

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Usaha di sektor pertanian secara teknis akan selalu dihadapi pada risiko ketidakpastian yang cukup tinggi. Risiko dan ketidakpastian tersebut disebabkan perubahan iklim, banjir, kekeringan, serangan hama dan penyakit tanaman, serta ketidakpastian harga pasar yang dapat merugikan petani. Hal ini jika dibiarkan lebih lanjut akan berdampak terhadap stabilitas ketahanan pangan nasional, khususnya produksi dan ketersediaan bahan pangan pokok beras. Program ketahanan pangan yang digagas pemerintah menawarkan salah satu cara melakukan ganti rugi gagal panen dengan adanya upaya sistematis dan melembaga untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian tersebut melalui asuransi pertanian (Syakir *et, all* 2016).

Asuransi dalam Bahasa Belanda “*verzekering*” yang artinya pertanggungan. Dari segi ekonomi, asuransi berarti suatu pengumpulan dana yang dapat dipakai untuk menutup atau memberi ganti rugi kepada orang yang mengalami kerugian. Asuransi pertanian bukan hanya mencakup perlindungan terhadap fluktuasi harga, tetapi secara khusus mencakup pembagian risiko karena kekeringan, banjir dan serangan organisme pengganggu tanaman serta faktor eksternal lainnya, seperti bencana longsor, gempa bumi, masalah politik dan lainnya (Syakir *et, all* 2016). Menurut Epitemehim (2011) peneliti dari Nigeria mengatakan bahwa asuransi pertanian membantu petani mengurangi risiko dengan mengatur pola tanam, membangun irigasi yang baik agar bisa melakukan usahatani pada musim panas.

Negara India, Brazil dan USA merupakan negara yang melakukan pendekatan asuransi pertanian berdasarkan hasil (*Area-Yield Index Base*) dimana semua risiko yang dapat mengurangi hasil panen di wilayah yang lebih luas (distrik). India, Mexico, Canada dan beberapa negara Afrika melakukan pendekatan asuransi pertanian berdasarkan cuaca (*Weather Base*) dimana risiko diukur berdasarkan posisi cuaca/iklim (kekeringan, curah hujan yang berlebihan, hujan es). Sedangkan Eropa, Amerika Utara, Amerika Latin, Cina, Korea Selatan melakukan pendekatan asuransi tradisional dimana risiko terjadi bencana alam, kebakaran hutan, kekeringan, banjir, dll. (Insyafiah dan Wardhani,2014).

Indonesia sendiri juga sudah mengenal yang namanya program asuransi pertanian yang telah dibuat oleh pemerintah. Ada dua jenis program asuransi pertanian yaitu Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) dan Asuransi Usahatani Padi (AUTP). Asuransi usahatani padi adalah jenis asuransi yang dirancang khusus untuk memberikan perlindungan terhadap risiko yang dihadapi oleh para petani padi. Pada tahun 2008, Kementerian pertanian bekerja sama dengan *Center for Agriculture Socio-Economics and Policy Studies* (ICASEPS) dan *Food and Agriculture Organisation Regional Office for Asia and The Pacific* (FAO-RAP) telah menyusun kajian “asuransi pertanian untuk tanaman padi”. *Outcome* dari hasil kajian ini adalah mendukung disahkannya draf undang-undang asuransi pertanian. (Kementerian pertanian, 2017).

Pokja asuransi pertanian adalah kelompok kerja atau tim yang khusus dibentuk untuk mengkaji, mengembangkan, dan mengelolah aspek-aspek terkait asuransi dalam sektor pertanian. Tugas-tugas pokja asuransi meliputi, pengembangan produk-produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk melakukan analisis risiko yang dapat mengakibatkan kerugian finansial, agar dapat memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya asuransi dengan bijak serta dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja produk asuransi dan melakukan monitoring terhadap klaim yang diajukan nasabah. (Sulaiman *et al.*, 2017).

Pokja asuransi melaksanakan *public hearing* asuransi pertanian di kabupaten Tabanan-Bali dan Sumatera selatan (kabupaten Oku Timur) untuk mendapatkan informasi di lapangan. Selain menyusun kajian, sejak tahun 2012, AUTP telah melakukan uji coba program oleh pemerintah di berbagai provinsi. Uji coba dilakukan sebanyak tiga tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada musim tanam Oktober 2012 s.d Maret 2013 di Provinsi Sumatera Selatan (kabupaten Oku Timur), Jawa Timur (kabupaten Tuban dan Gresik), dan Jawa Barat (kabupaten Karawang). Uji coba tahap kedua dilaksanakan pada musim tanam Oktober 2013 s.d Maret 2014 di Provinsi Sumatera Selatan dan Jawa Timur. Uji coba tahap ketiga dilaksanakan pada musim tanam November 2013 sampai April 2014 di Provinsi Jawa Timur. Prinsip asuransi pertanian yang dilaksanakan selama uji coba adalah *indemnity*. Setelah dilakukan uji coba sebanyak tiga kali, kemudian

pada tahun 2015 pemerintah resmi menjalankan asuransi usahatani padi secara nasional. Pelaksanaan asuransi pertanian merupakan tanggung jawab pemerintah. Amanat undang-undang No.19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani pasal 37 ayat (1) mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usahatani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian. (Kementerian Pertanian, 2017).

Adanya asuransi bukan hal yang baru untuk sektor pertanian. Beberapa negara maju dan berkembang telah menerapkan kebijakan asuransi pertanian untuk menjaga produksi pertanian dan melindungi pertanian, adapun media penyaluran asuransi pertanian di beberapa negara antara lain perusahaan asuransi, dan bank pertanian. Dalam penerapannya banyak negara yang melakukan perlindungan bagi petani setelah petani mengalami bencana/gagal panen. Perlindungan petani secara umum dilakukan melalui dua cara di sektor pertanian yaitu secara tradisional dan melindungi petani melalui skema asuransi pertanian.

Produk asuransi usahatani padi mendapatkan dukungan dari pemerintah, dalam hal ini produk pertanian adalah asuransi usahatani padi (AOTP) yang memberikan perlindungan kepada petani dari ancaman risiko gagal panen di akibatkan banjir, kekeringan, penyakit dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Prinsip asuransi pertanian yang dilaksanakan selama uji coba adalah ganti rugi (*indemnity*), dimana petani hanya perlu membayar premi sebesar Rp36.000/Ha/Mt. Dengan subsidi pemerintah Rp144.000/Ha/Mt. Jika mengalami musibah baik itu banjir atau kekeringan dan terkena hama penyakit, bisa mendapatkan ganti rugi berupa uang sebesar Rp6 juta/Ha. (PT. Jasindo).

Provinsi Sumatra utara merupakan salah satu provinsi yang memiliki produktivitas padi yang lumayan tinggi (BPS Sumatera Utara, 2021). Data produktivitas tanaman padi di Provinsi pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Data Produktivitas tanaman padi di Provinsi 2021.

Provinsi	Luas panen tanaman padi (Ha)	Produktivitas tanaman padi (Ku/Ha)	Rekap produksi padi (ton)
Aceh	297.058,38	55,03	1.634.639,6
<b>Sumatera Utara</b>	<b>385.405</b>	<b>52</b>	<b>2.004.142,51</b>
Sumatera barat	272.391,95	48,36	1.317.209,38
Sumatera Selatan	496.241,65	51,44	2.552.443,19
Jawa Barat	1.604.109,31	56,03	9.113.573,08
Jawa Timur	1.747.481,2	56,02	9.789.587,67
Kalimantan Barat	223.165,74	31,9	711.898,01
Sulawesi Selatan	985.158,23	51,67	5.090.637,23

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2021)

Berdasarkan data tabel diatas Provinsi Jawa Timur memiliki luas panen tanaman padi dengan luas lahan 1.747.481,2 Ha dengan produksi padi sebesar 9.789.587,67. Dibandingkan dengan Sumatera Utara memiliki luas panen tanaman sebesar 385405 ha, produktivitas tanaman padi sebesar 52 (Ku/Ha) dan rekap produksi padi sebesar 2004142,51 ton.

Menurut badan pusat statistik tahun 2023 tercatat produksi padi di Sumatera Utara meningkat dari tahun 2021. Peningkatan produktivitas tersebut dibarengi dengan peninkatan luas lahan juga. Dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Produksi Dan Luas Lahan Tanaman Padi Di Provinsi Sumatra Utara, Pada Tahun 2021 – 2023

Kategori	2021	2022	2023
Produksi (Ton)	2.004.142,51	2.088.672,38	2.080.663,46
Luas lahan (Ha)	385.405,00	411.462,10	404.472,52

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara (2023)

Berdasarkan data tabel diatas produksi padi di Sumatera Utara mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke 2022 sebesar 84.529,87 ton, sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 8.008,93 ton. Luas lahan tanaman padi mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke 2022 sebesar 26.057,1 ha, sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 6989,58 ha.

Kabupaten Serdang Bedagai Salah satu sentra tanaman pangan di Sumatera Utara. Yang terdiri dari tanaman padi sawah, jagung, ubi kayu, kedelai, dan lainnya. Produksi tanaman pangan di Serdang Bedagai dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Produksi Tanaman Pangan Serdang Bedagai 2023

No	Tanaman Pangan	Produksi (Ton)
<b>1</b>	<b>Padi Sawah</b>	<b>431.378</b>
2	Jagung	36.084

3	Ubi kayu	741.369
4	Kedelai	647

Sumber: Badan Pusat Statistik Serdang Bedagai (2023)

Berdasarkan data tabel diatas padi sawah berada pada peringkat kedua dalam jumlah produksi tanaman pangan dengan total produksi 431.378 ton. Tanaman padi sawah merupakan tanaman yang paling banyak diusahakan oleh masyarakat di kecamatan Sei Rampah. Luas panen, dan produksi tanaman padi dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Luas Panen dan Produksi padi sawah di kecamatan Sei Rampah 2022

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Sei Bambi	11.512	73.493
2	Perbaungan	9.737	69.853
3	Pantai Cermin	7.946	56.210
4	Tanjung Beringin	6.692	41.852
5	Teluk Mengkudu	5.654	36.943
6	Bandar Khalipah	5.274	33.353
<b>7</b>	<b>Sei Rampah</b>	<b>5.209</b>	<b>34.036</b>
8	Dolok Masihul	4.375	28.149

Sumber: Badan Pusat Statistik Serdang Bedagai (2023)

Berdasarkan luas panen dan produksi kecamatan di kabupaten Serdang Bedagai, luas panen terbesar adalah Sei Bambi dengan luas panen 11.512 ha dengan produksi 73.493 ton, di susul oleh kecamatan Perbaungan dengan luas panen 9.737 ha dengan produksi 69.853 ton, dibandingkan kecamatan Sei Rampah di urutan ke tujuh dengan luas panen 5.209 ha, produksi padi di kecamatan Sei Rampah berada pada urutan ke enam dengan produksi padi 34.036 ton.

Desa Silau Rakyat merupakan salah satu desa dari 17 desa yang ada di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Penduduk Desa Silau Rakyat sebagian besar bekerja sebagai petani, pertanian merupakan sektor utama didesa ini. Lahan pertanian digunakan untuk menanam berbagai jenis tanaman seperti padi, jagung dan sayuran. Luas lahan padi di Desa Silau Rakyat sebesar 248 ha dengan jumlah petani 516 orang. Petani di desa ini terus mengalami permasalahan banjir di lahan pertaniannya yang mengakibatkan gagal panen dalam budidaya tanaman pangan, terutama padi. Kegagalan ini mendorong petani untuk mencari solusi terhadap masalah ini, salah satu program yang di berikan

pemerintah untuk meringankan permasalahan yang di alami petani ialah program AOTP.(Kantor Desa Silau Rakyat).

Program AOTP menjadi program yang di manfaatkan masyarakat di Desa Silau Rakyat dalam menanggulangi masalah yang terjadi. Program ini dibuat oleh pemerintah skala Nasional, membantu mengupayakan perlindungan usaha tani dalam bentuk asuransi pertanian sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyebutkan bahwa asuransi pertanian merupakan salah satu alat bagi pemerintah untuk melindungi petani dari gagal panen, yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan peraturan menteri pertanian No 40 tahun 2015 tentang fasilitas asuransi pertanian. Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 19 Tahun 2013 menyatakan bahwa sesuai dengan kewenangannya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memfasilitasi setiap petani menjadi peserta asuransi. Salah satu fasilitas tersebut adalah bantuan pembayaran premi. (Kementerian Pertanian, 2017)

Secara umum petani setuju terhadap program yang mampu memberikan keringanan kepada petani apabila terjadi gagal panen (Primandita *et al.* 2018). Petani yang mengikuti asuransi usahatani padi juga merasa terlindungi karena mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami apabila terjadi gagal panen. Namun kebanyakan petani menilai bahwa program AOTP hanya memberikan manfaat ketika mereka mengalami gagal panen.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi petani pada program asuransi usahatani padi yang diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap risiko ketidakpastian yang dihadapi oleh petani di Desa Silau Rakyat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti mengenai Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Petani dalam Mengikuti Asuransi Usahatani Padi (AOTP)

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Petani Dalam Program Asuransi Usahatani Padi (AOTP)

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi petani padi diharapkan dapat berpartisipasi terkait program AUTP agar program tersebut berjalan dengan baik.
2. Bagi peneliti lanjutan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan sebagai rujukan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.